

BAB IV

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kebijakan migrasi di Eropa sangat dipengaruhi oleh politik, terutama sejak krisis pengungsi 2015. Partai-partai populis sayap kanan telah memanfaatkan ketakutan seputar imigrasi, menggambarkan migran sebagai ancaman terhadap identitas nasional, keamanan, dan sistem kesejahteraan untuk menggalang dukungan pemilih. Politisasi ini memperdalam polarisasi di dalam dan antara negara-negara anggota UE, karena negara-negara memprioritaskan kepentingan nasional di atas solidaritas UE secara keseluruhan. Tekanan domestik membentuk sikap para pemimpin, seringkali menghasilkan kebijakan migrasi yang terfragmentasi dan nasionalis. Kenaikan populisme dan narasi nasionalis mempersulit kerja sama dan melemahkan respons UE yang terpadu terhadap tantangan migrasi.

Pengelolaan migrasi UE menghadapi tantangan institusional yang signifikan. Kerangka kerja seperti Sistem Suaka Eropa Bersama (CEAS) dan Peraturan Dublin bertujuan untuk harmonisasi, tetapi gagal memastikan pembagian beban yang adil di antara negara anggota. Negara-negara garis depan seperti Yunani menanggung beban yang tidak proporsional untuk migran yang masuk tanpa dukungan institusional yang memadai. Struktur institusional UE yang terfragmentasi—dengan kewenangan bersama dan kedaulatan nasional yang dipertahankan—melemahkan kemampuan untuk mengelola migrasi secara terpadu dan efektif. Selain itu, penegakan standar hak asasi manusia tidak merata, dengan mekanisme hukum yang tidak memadai untuk mempertanggungjawabkan negara anggota atas pelanggaran, mengakibatkan masalah kemanusiaan dan hukum yang berulang, terutama di perbatasan eksternal.

Ketidaksetaraan struktural antara negara-negara inti dan pinggiran UE mendasari sebagian besar krisis ini. Ketimpangan ekonomi, politik, dan geografis berarti negara-negara di perbatasan luar UE, seperti Yunani, menghadapi tekanan yang berlebihan dengan sumber daya yang terbatas, memperburuk kondisi bagi migran dan pencari suaka. Ketidakseimbangan struktural ini dijelaskan sebagai

“kekerasan struktural,” di mana pengaturan institusional dan kebijakan secara sistematis menimbulkan penderitaan dan marginalisasi terhadap kelompok rentan dan negara-negara garis depan. Desain sistem ini mempertahankan tanggung jawab yang tidak setara dan memperkuat perpecahan di dalam UE, merusak solidaritas yang sejati dan berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik.

Faktor-faktor di atas menjelaskan mengapa kebijakan migrasi UE tetap dipenuhi ketegangan dan disfungsi. Fragmentasi politik yang didorong oleh nasionalisme populis, kelemahan institusional dalam pembagian beban dan perlindungan hak, serta ketidaksetaraan struktural yang mendalam antara negara anggota saling beririsan, mempersulit upaya menuju tata kelola migrasi Eropa yang adil dan efektif. Reformasi yang berarti harus mengatasi ketiga dimensi yang saling terkait ini untuk menciptakan pendekatan yang lebih adil, berkelanjutan, dan bersatu.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi berikut dapat diajukan;

1. Uni Eropa: Uni Eropa harus memastikan pembagian beban yang adil untuk mendukung negara-negara garis depan seperti Yunani, memperkuat penegakan hak asasi manusia di perbatasan, dan merevisi Peraturan Dublin untuk mengurangi ketidaksetaraan sistemik. Peningkatan kerja sama, transparansi, dan pendanaan untuk keamanan perbatasan dan layanan perlindungan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mempertahankan nilai-nilai Uni Eropa.
2. Pemerintah Yunani: Yunani memerlukan dukungan UE yang lebih besar untuk mengelola migrasi secara berkelanjutan dan meningkatkan kondisi bagi pencari suaka dengan memperkuat infrastruktur dan perlindungan hukum. Partisipasi aktif dalam reformasi UE akan membantu memastikan pembagian beban yang lebih adil dan mengurangi tekanan berlebihan pada Yunani sebagai negara garis depan.
3. Penelitian selanjutnya: Penelitian masa depan harus menilai dampak kebijakan migrasi UE yang baru terhadap migran dan komunitas,

menganalisis bagaimana politik populis memengaruhi tata kelola migrasi, dan meneliti ketidaksetaraan struktural di dalam UE. Penelitian tentang peran negara perbatasan eksternal seperti Yunani dalam menyeimbangkan keamanan dan keprihatinan kemanusiaan juga penting.